TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT. BPR Kridadhana Citranusa
Posisi Laporan	:	31 Desember 2022
Alamat	:	Jl. Semeru Selatan No.7 Dampit Kab. Malang
Nomor Telepon	:	0341896705
Penjelasan Umum	:	Penerapan Tata Kelola BPR Kridadhana Citranusa posisi 31 Desember 2022

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Suati Rakhmawati	Direktur Utama	Direktur Utama
2	Andreas Roy Dirgantara Abadi	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris
Menjaga NPL dibawah 5% dan melaksanakan RBB 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Penyaluran kredit sesuai prinsip kehati-hatian, menyelesaikan nasabah bermasalah sesuai ketentuan dan menindaklanjuti temuan auditor intern dan ekstern

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Suryadin Achmad	Komisaris Utama	Komisaris Utama
2	Surjaningrum Notodihardjo	Komisaris	Komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi
Menjaga NPL dibawah 5% dan mengawasi plaksanaan RBB 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Pengawasan penyaluran kredit sesuai prinsip kehati-hatian, penyelesaian nasabah bermasalah sesuai ketentuan dan pengawasan tindaklanjuti temuan aditor intern dan ekstern oleh Direksi

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Anggota Direksi tidak memiliki saham di BPR

Form A.02.20

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.03.10

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Suati Rakhmawati	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Andreas Roy Dirgantara Abadi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan pada BPR

Form A.03.20

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Suati Rakhmawati	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Andreas Roy Dirgantara Abadi	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Anggota Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga pada BPR

Form A.04.10

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Suryadin Achmad	240.000.000	7,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Suryadin Achmad

Form A.04.20
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Suryadin Achmad	PT BPR Delta Arta Kencana	10,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Suryadin Achmad

Form A.05.10

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Suryadin Achmad	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Surjaningrum Notodihardjo	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Anggota Dewan Komisari tidak mempunyai hubungan keuangan pada BPR

Form A.05.20

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Suryadin Achmad	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Surjaningrum Notodihardjo	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	402000000	2	162000000
2	Tunjangan	2	33500000	2	5250000
3	Tantiem	2	125000000	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	37000000	2	13500000
	Total		597500000		180750000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.06.20

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2	Transportasi	Mobil Dinas	Tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4	Fasilitas lainnya	BBM Mobil Dinas	BBM Kehadiran

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.07.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

		Perbandingan	
No	Keterangan	(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,46	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,24	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,08	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,93	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,04	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.08.10
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	29-01-2022	4	Mengenai perkembangan jalannya operasional BPR sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 dan tindaklanjut temuan pemeriksaan OJK tahun 2021.
2	22-04-2022	4	Mengenai perkembangan jalannya operasional BPR sampai dengan Triwulan I tahun 2022 dan tindaklanjut progres pemeriksaan OJK 2021.
3	16-07-2022	4	Mengenai perkembangan jalannya operasional BPR sampai dengan Triwulan II tahun 2022, pencapaian realisasi dibandingkan Triwulan I 2022, proyeksi dan realisasi RBB semester I 2022, serta penanganan kredit nasabah bermasalah.
4	29-10-2022	4	Mengenai proyeksi dan realisasi RBB semester III 2022, serta penanganan kredit bermasalah dimasa Covid-19.
5	10-12-2022	4	Mengenai RBB 2023 dan tindaklanjuti temuan pemeriksaan OJK 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.08.20

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Suryadin Achmad	5	0	100,00
2	Surjaningrum Notodihardjo	5	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Kehadiran Dewan Komisaris selain melakukan rapat, juga melakukan tugasnya sebagai pengawas kepada pengelola, yang hadir setiap saat di kantor pusat BPR

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.10.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Surat Gugatan Lelang atas nama Kusnoto

Form A.11.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.12.00

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form B.00.00

Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) atas Penerapan Tata Kelola BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama BPR	:	PT. BPR Kridadhana Citranusa
Posisi Laporan	:	31-12-2022
Alamat	:	Jl. Semeru Selatan No.7, Dampit - Kabupaten Malang
Nomor Telepon	:	341896705
Modal Inti BPR	:	7.808.986.987,00
Total Aset BPR	:	39.210.863.731,00
Bobot BPR	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	2,0
Peringkat Komposit	:	2
Analisis	:	Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan 11 faktor masih perlu perbaikan yaitu meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan dan otoritas. BPR telah mempunyai pedoman Tata Kelola dan mengangkat Pejabat Eksekutifnya.

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,75	0,85	0,18	1,78	0.356	Baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,84	0,95	0,20	1,99	0.299	Baik
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Baik
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,80	0,30	1,60	0.160	Baik
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,10	1,20	0,30	2,60	0.260	Baik
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Baik
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,60	0,20	1,30	0.033	Baik
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,17	1,20	0,25	2,62	0.262	Baik
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	Baik
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	Baik
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,50	0,20	1,70	0.128	Baik
Nilai Komposit						2.0	
Peringkat Komposit						Baik	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No Kep-66/KO.0401/2017
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direktur Utama NIK 3573014608740010 Direktur NIK 3507240904710003
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Tidak menjabat
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Tidak memiliki hubungan keluarga sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Tidak menggunakan konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Kridadhana Citranusa No. 013 tanggal 26 Oktober 2021, dibuat dihadapan Leidi Astria Dhiane, SH, M.KN. Notaris di Kabupaten Malang, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat No. AHU-AH.01.03-0466879 tanggal 29 Oktober 2021
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,75	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Sesuai jobdesk Direksi
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Tercantum dalam hasil tindaklanjut temuan audit
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Laporan Komisaris tiap bulan
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Rapat Direksi
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Tertib Direksi dan Pedoman kode etik
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Dibentuk cadangan pendidikan 5 persen dari Beban Tenaga Kerja Tahun 2021
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Sesuai hasil pemeriksaan OJK 2022, masih perlu ada perbaikkan
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	SK Direksi No. DIR/792 A/KDCN/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Penerapan Tata Kelola
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	RUPS tanggal 08 Januari 2022
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Rapat awal tahun tanggal 21 Januari 2022 dengan Pejabat Eksekutif, Kepala Kantor membahas RBB
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Rapat Pengurus BPR
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Masih ada pegawai yang perlu pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Media BPR Perbarindo
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Kridadhana Citranusa No. 013 tanggal 26 Oktober 2021, dibuat dihadapan Leidi Astria Dhiane, SH, M.KN. Notaris di Kabupaten Malang, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat No. AHU-AH.01.03-0466879 tanggal 29 Oktober 2021
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Kridadhana Citranusa No. 013 tanggal 26 Oktober 2021, dibuat dihadapan Leidi Astria Dhiane, SH, M.KN. Notaris di Kabupaten Malang, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat No. AHU-AH.01.03-0466879 tanggal 29 Oktober 2021
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Kridadhana Citranusa No. 013 tanggal 26 Oktober 2021, dibuat dihadapan Leidi Astria Dhiane, SH, M.KN. Notaris di Kabupaten Malang, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat No. AHU-AH.01.03-0466879 tanggal 29 Oktober 2021
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Komisaris Utama : NIK 3573050302520002 Komisaris NIK 3573045111630002
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Tertib Dewan Komisaris
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Tertib Dewan Komisaris

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Pedoman dan Program Benturan Kepentingan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan minimal 4 kali dalam setahun
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Rapat Dewan Komisaris
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Tertib Dewan Komisaris - Kode Etik Dewan Komisaris
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Tertib Dewan Komisaris - Tanggung Jawab Dewan Komisaris
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Tertib Dewan Komisaris - Waktu Kerja dan rapat Dewan Komisaris

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Tertib Dewan Komisaris - Waktu Kerja dan rapat Dewan Komisaris
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata Tertib Dewan Komisaris - Kode Etik Dewan Komisaris
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Rapat Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,38	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,95	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Telah didokumentasikan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
	Total nilai skala penerapan	0	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	SK Direksi No. DIR/792 A/KDCN/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Penerapan Tata Kelola
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Pedoman dan Prosedur Benturan Kepentingan berlaku untuk Pengurus, Pejabat Eksekutif dan Pegawai
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	Belum terjadi di BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	3	Tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Memahami, jika ada kendala dikonsultasikan dengan pengawas OJK dan pihak terkait lainnya
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	Surat Keputusan Direksi No. DIR/860/KDCN/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, Sdri. Della Novita Saksono
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Mengkinikan sesuai arahan pengawas OJK
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	SK Direksi No. DIR/792 A/KDCN/XII/2015 tanggal 01 Desember 2015 tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Penerapan Tata Kelola
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,20	
	Bobot	0,50	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,10	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Membuat daftar laporan yang harus disampaikan kepada OJK dan otoritas lainnya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Secara bertahap mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui sosialisasi dan pelatihan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Secara bertahap menjaga komitmen terciptanya budaya kepatuhan melalui sosialisasi dan pelatihan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Secara bertahap seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Secara bertahap melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	3	Meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Kebijakan dan keputusan Direksi sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Surat Keputusan Direksi No. DIR/827/KDCN/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, Sdri. Priskila Lediani Setjo, Surat OJK No. S-16/KO.04011/2018, tanggal 24 Januari 2018
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Independen
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Belum memiliki tetapi meningkatkan pengetahuan dan pelatihan dan sosialisasi PE AI
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Peningkatan pengetahuan dengan pelatihan dan sosialisasi PE AI
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Surat Penugasan Audit No. 31/OP/00.65/VIII/2022 tanggal 26-08-2022, Perjanjian Pemakaian Jasa Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan No. 31/OP/0066/KDCN/IX/2022 tanggal 26-08-2022
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	RUPSLB tanggal 20-08-2022
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Telah disampaikan oleh KAP
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sesuai ketentuan OJK

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	Surat Keputusan Direksi No.DIR/860/KDCN/V/2019 tanggal 23 Mei 2019, Sdri. Della Novita Saksono surat OJK No.S-054/KO.04012/2019 tanggal 26 juni 2019
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,17	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Surat Keputusan Direksi No.25/DIR/KDCN/XII/2016 tanggal 01 Desember 2016, tentang Penerapan Manajemen Risiko
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Manajemen Risiko via Apolo meliputi 4 risiko
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Belum ada produk dan aktivitas baru sesuai RBB 2021
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,25	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tanggal 08-11-2019 No. 868/XI/2019
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tanggal 08-11-2019 No. 868/XI/2019
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Kebijakan dan Prosedur Perkreditan tanggal 08-11-2019 No. 868/XI/2019
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	LBBPR bulanan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	LBBPR bulanan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Laporan RBB tahun 2023 tanggal 08 Desember 2022
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Menggambarkan sebagian permasalahan beserta rencana penyelesaiannya
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Didukung sepenuhnya oleh PS, SDM, TI, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Telah mempertimbangkan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tata tertib Dewan Komisaris
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan RBB via Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) tanggal 14 Desember 2022
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	CBS - Heasoft
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	LBBPR - Publikasi triwulanan via apolo.ojk.go.id
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan triwulan IV, Laporan Publikasi Tahunan yang diaudit oleh KAP dan pengumuman dimedia massa serta papan pengumuman dijaringan kantor
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.24/DIR/797/KDCN/XII/2015, tanggal 01 Desember 2015 - Pedoman dan Prosedur Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa keuangan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Self Assesment Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa keuangan setahun sekali per 30 September
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,50	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan Publikasi triwulanan via apolo.ojk.go.id, media massa dan papan pengumuman di jaringan kantor
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan pengaduan triwulan I, II, III dan IV 2022 via SIPEDULI
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Kridadhana Citranusa

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jl. Semeru Selatan No. 07 Dampit, Malang
Telp. +62341 896705 Email : kdcn_kp@yahoo.co.id
www.bprkridadhana.com

LEMBAR PERSETUJUAN

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2022 yang telah kami capai yang kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 31 Januari 2023

PT. BPR. KRIDADHANA CITRANUSA

Suati Rakhmawati	**Suryadin Achmad**
Direktur Utama	Komisaris Utama

Jl. Semeru Selatan No. 07 Dampit, Malang
Telp. +62341 896705 Email : kdcn_kp@yahoo.co.id
www.bprkridadhana.com

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : BPR Kridadhana Citranusa

Posisi : 31 Desember 2022

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
2.0	**2**
Analisis	
Penerapan Tata Kelola BPR dengan mempertimbangkan 11 faktor masih perlu perbaikan yaitu meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan Sumber Daya Manusia, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan dan otoritas. BPR telah mempunyai pedoman Tata Kelola dan mengangkat Pejabat Eksekutifnya.	

Malang, 31 Januari 2023

PT. BPR. KRIDADHANA CITRANUSA

Suati Rakhmawati
Direktur Utama

Suryadin Achmad
Komisaris Utama